

MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Nurul Huda
kaconghuda@gmail.com
Universitas Nurul Jadid

Abstrak: Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, salah satu komponen penting di dalamnya adalah kurikulum. Kurikulum adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan dan menunjang satu sama lain. Komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Dalam bentuk sistem ini kurikulum akan berjalan menuju suatu tujuan pendidikan dengan adanya saling kerja sama di antara seluruh sub sistemnya. Jika salah satu dari variabel kurikulum tidak berfungsi dengan baik, maka sistem kurikulum akan berjalan kurang optimal. Selain itu dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan suatu perencanaan dan pengorganisasian pada seluruh komponennya. Pada tulisan ini akan memaparkan manajemen pengembangan kurikulum yang dipandang dalam perspektif pendidikan Islam.

Kata kunci: *kurikulum, sekolah, pendidikan Islam*

A. Pendahuluan

Konsep pengembangan kurikulum dapat diartikan dari dua jenis proses, yaitu pengembangan dalam arti perekayasaan (engineering) dan pengembangan dalam arti konstruksi. pengembangan kurikulum PAI merupakan kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode tertentu (Baharun, 2017). Proses pengembangan dalam arti pertama terdiri dari empat tahap, yaitu; *pertama*, menentukan Fondasi (dasar-dasar yang diperlukan untuk mengembangkan kurikulum). *Kedua*, menentukan Konstruksi (mengembalikan model kurikulum yang diharapkan berdasarkan fondasi). *Ketiga*, Implementasi (pelaksanaan

kurikulum). *Keempat*, Evaluasi (menilai kurikulum secara komprehensif dan sistemik).¹

Proses Pengembangan kurikulum dalam arti kedua, yaitu: proses pengembangan secara mikro, yang pada garis besarnya melalui empat proses kegiatan, yaitu; merancang tujuan, merumuskan materi, menetapkan metode, dan merancang evaluasi. Pengembangan kurikulum berlandaskan manajemen berarti melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum berdasarkan pola pikir manajemen, atau berdasarkan proses manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen, dalam hal ini dilihat fungsi manajemen Gregg mengemukakan bahwa fungsi manajemen meliputi; *Decision Making, Planning, Organizing, Communicating, Influencing, Coordinating* dan *Evaluating*. Sementara menurut Lichfield fungsi manajemen terdiri dari; *decision making, programming, communicating, controlling*, dan *reappraising*. Sedangkan menurut Campbell fungsi manajemen meliputi: *decision making, programming, stimulating, coordinating*, dan *appraising*. Robinson berusaha mengkompromikan berbagai pandangan di atas, dengan menyatakan bahwa yang paling pokok dan harus ada dalam fungsi-fungsi manajemen, adalah; *Planning, Organizing, Actuating*, dan *Controlling* yang dikenal dengan istilah POAC.² *Pertama*, Perencanaan Kurikulum yang dirancang berdasarkan analisis kebutuhan, menggunakan model tertentu yang mengacu kepada suatu desain kurikulum yang efektif. *Kedua*, Pengorganisasian Kurikulum yang ditata baik secara struktural maupun secara fungsional. *Ketiga*, Implementasi Kurikulum yaitu pelaksanaan kurikulum di lapangan. *Keempat*, Pengawasan Kurikulum yaitu mencakup evaluasi kurikulum.

Dalam manajemen pengembangan kurikulum yang pertama terdiri dari empat tahap; *pertama* menentukan fondasi, yaitu dasar-dasar yang diperlukan untuk mengembangkan kurikulum. *Kedua*, Konstruksi

¹ Hasibuan, 1990, *Manajemen Dasar; Pengertian dan Masalah*, Bandung, CV. Haji Masagung. Hlm, 12.

² Hasibuan, 1990, *Manajemen Dasar.....* Hlm, 15.

(mengembalikan model kurikulum yang diharapkan berdasarkan fondasi), Implementasi (pelaksanaan kurikulum), Evaluasi (menilai kurikulum secara komprehensif dan sistemik). Ini merupakan pendekatan kurikulum secara makro³. Sebagaimana diketahui bahwa kurikulum adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan dan menunjang satu sama lain. Komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Dalam bentuk sistem ini kurikulum akan berjalan menuju suatu tujuan pendidikan dengan adanya saling kerja sama di antara seluruh sub sistemnya.

Mengingat pentingnya pendidikan dalam upaya mengangkat harkat dan martabat serta menyiapkan manusia yang memiliki intelektualitas, spiritualitas dan akhlakul kamrimah, maka pendidikan semacam ini memerlukan suatu usaha dan pemikiran yang keras dan serius dalam upaya mewujudkan cita-citanya (Baharun, 2016). Jika salah satu dari variabel kurikulum tidak berfungsi dengan baik, maka sistem kurikulum akan berjalan kurang optimal.

Beranjak dari bentuk kurikulum tersebut, maka dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan suatu perencanaan dan pengorganisasian pada seluruh komponennya (Islam, 2017). Adapun di dalam proses pengorganisasian ini akan berhubungan erat dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan. Maka dalam penerapan pelaksanaan kurikulum, seorang yang mengelola lembaga pendidikan harus menguasai ilmu manajemen, baik untuk mengurus pendidikan ataupun kurikulumnya sebagai operasinal dari pendidikan.

B. Pengertian Kurikulum dan Manajemen Kurikulum

Beberapa ahli pendidikan telah membuat deskripsi yang berbeda-beda tentang pengertian kurikulum, di antaranya adalah:

³ Oemar Hamalik, 2007, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta, PT. Bumi Aksara. Hlm, 113.

1. Ralp Tyler (1949) mendefinisikan kurikulum sebagai semua pelajaran-pelajaran murid yang direncanakan dan dilakukan oleh pihak sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikannya.
2. E. Eisner (1979) mengatakan bahwa dengan kurikulum kita mengartikannya dengan pengalaman-pengalaman yang ditawarkan kepada murid di bawah petunjuk dan bimbingan sekolah.
3. A. Glattorn (1987) mendefinisikan kurikulum ialah rencana-rencana itu dibuat untuk membimbing dalam belajar disekolah biasanya meliputi dokumen, level secara umum, dan aktualisasi dari rencana-rencana itu dikelas, sebagai pengalaman murid yang telah dicatat dan ditulis oleh seorang ahli, pengalaman-pengalaman tersebut ditempatkan dalam lingkungan belajar yang juga mempengaruhi apa yang dipelajari.⁴

Sedangkan pengertian secara semantik kurikulum dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Kurikulum secara *Tradisional* mata pelajaran yang diajarkan di sekolah atau bidang studi.
2. Kurikulum secara *Modern* semua pengalaman aktual yang dimiliki siswa di bawah pengaruh sekolah, sementara bidang studi adalah bagian kecil dari program kurikulum secara keseluruhan.
3. Kurikulum masa *Kini* strategi yang digunakan untuk mengadaptasikan pewarisan kultural dalam mencapai tujuan di sekolah.⁵

Sedangkan menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁶ Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan

⁴Anim Nurhayati, 2010, *Inovasi Kurikulum; Telaah terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren* (Yogyakarta: Teras). Hlm, 4.

⁵Husaini Usman, 2008, *Manajemen; Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara. Hlm, 35.

⁶UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Surabaya, PT Nasional.

potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah masing-masing. Pengembangan kurikulum yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan alat yang paling penting dalam keberhasilan suatu pendidikan, tanpa adanya kurikulum yang baik dan tepat maka akan kesulitan dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan baik formal, informal, maupun non formal.

Dari berbagai macam pengertian kurikulum tersebut baik secara bahasa, istilah maupun arti kurikulum berdasarkan para ahli, maka manajemen kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum secara kooperatif, komprehensif, dan sistematis untuk mengacu ketercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. Dalam proses manajemen kurikulum tidak lepas dari kerjasama sosial antara dua orang atau lebih secara formal dengan bantuan sumber daya yang mendukungnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan metode kerja tertentu yang efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya, serta mengacu pada tujuan kurikulum yang sudah ditentukan sebelumnya.⁷

Manajemen merupakan suatu proses/ilmu untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien (Hasan Baharun, 2017).

Dalam pelaksanaannya, pengembangan kurikulum harus berdasarkan dan disesuaikan dengan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M), dan kurikulum pada satuan pendidikan. Dengan pengertian bahwa manajemen kurikulum itu atas dasar konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah. Suatu institusi pendidikan diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan dalam merancang dan mengelola

⁷ Sulistyorini, 2009, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras). Hlm, 40.

kurikulum menurut kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Pemerintah hanya menetapkan standar nasional dan untuk pengembangannya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga sekolah dan madrasah terkait.

Mulyasa mengatakan bahwa desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah diberlakukan untuk memberikan keluasaan pada sekolah dan melibatkan masyarakat untuk mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikanya sesuai prioritas kebutuhan dengan seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Tidak hanya itu dengan pemberdayaan sekolah lewat pemberian otonomi adalah bentuk tanggap dari pemerintah terhadap tuntutan masyarakat dan pemerataan pendidikan.⁸

C. Fungsi dan Prinsip Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum ini tidak hanya berfungsi untuk peserta didik semata, namun juga berfungsi untuk para pendidik (guru). Adapun fungsi kurikulum terhadap peserta didik yaitu kurikulum sebagai organisasi pengalaman belajar yang disusun dan disiapkan untuk peserta didik sebagai salah satu konsumen. Dengan ini diharapkan mereka akan memperoleh sejumlah pengalaman baru yang kelak dapat dikembangkan seirama dengan perkembangannya guna melengkapi bekal hidupnya. Sebagai alat dalam mencapai tujuan pendidikan, kurikulum diharapkan mampu menawarkan program-program pada peserta didik yang akan hidup pada zamannya, dengan latar belakang sosiohistoris dan kultural yang berbeda dengan zaman di mana kedua orang tuanya berada.

Sedangkan fungsi kurikulum bagi guru yaitu sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisasikan pengalaman belajar pada anak didik dan menjadi pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak didik dalam rangka meyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. Sehingga pada masa mendatang mereka dapat menjadi orang yang berhasil dalam bidang yang ditekuninya.

⁸ Oemar Hamalik, 2006, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya). Hlm, 16.

Dengan adanya kurikulum, sudah tentu tugas pendidik sebagai pengajar dan pendidik lebih terarah. Pendidik juga merupakan salah satu kunci utama dalam menentukan dan sangat penting dalam proses pendidikan, dan merupakan salah satu komponen yang berinteraksi secara aktif dengan anak didik dalam pendidikan. Sebagai pedoman, kurikulum dijadikan sarana yang berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum suatu sekolah memuat uraian mengenai jenis-jenis program apa yang dilaksanakan sekolah tersebut.⁹ Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, di antaranya adalah:

1. Produktivitas, yaitu hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.
2. Demokratisasi, yaitu pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
3. Kooperatif, yaitu untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
4. Efektivitas dan efisiensi, yaitu serangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat.

⁹Nik Haryati, 2011, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam*, (Bandung: Alfabeta). Hlm, 9.

5. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, yaitu proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.¹⁰

Sedangkan menurut Nana Syaodih S. prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi dua prinsip utama, yaitu:

1. Prinsip Umum

- a. Prinsip Relevansi, yaitu ada dua macam relevansi yang harus ada pada kurikulum, yaitu relevansi keluar dan relevansi dalam. Relevansi keluar artinya tujuan, isi dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangannya. Sedangkan relevansi dalam yaitu adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian.
- b. Prinsip Fleksibilitas, yaitu kurikulum hendaknya bersifat fleksibel, yaitu dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang anak didik.
- c. Prinsip Kontinuitas, yaitu kesinambungan. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti begitu saja.
- d. Prinsip Praktis, yaitu mudah dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah.
- e. Prinsip Efektivitas yaitu, walaupun kurikulum harus murah dan sederhana tetapi keberhasilannya tetap harus diperhatikan.

2. Prinsip Khusus

- a. Prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan.
- b. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan.
- c. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar.

¹⁰Dadang Suhardan dkk, 2009, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung; Alfabeta). Hlm, 192.

- d. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran.
- e. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian.¹¹

D. Manajemen Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum adalah suatu proses sosial yang kompleks dan menuntut berbagai jenis tingkat pembuatan keputusan kebutuhan untuk mendiskusikan dan mengkoordinasikan proses penggunaan model-model aspek penyajian kunci. Sebagaimana pada umumnya rumusan model perencanaan harus berdasarkan asumsi-asumsi rasionalitas dengan pemrosesan secara cermat. Proses ini dilaksanakan dengan pertimbangan sistematis tentang relevansi pengetahuan secara filosofis (isu-isu pengetahuan yang berarti), sosiologis (argumen-argumen kecenderungan sosial), dan psikologi (dalam menentukan urutan materi pelajaran).

Perencanaan kurikulum dijadikan sebagai pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaian, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol, dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan perencanaan akan memberikan motivasi pada pelaksanaan sistem pendidikan sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Kegiatan inti pada perencanaan adalah merumuskan isi kurikulum yang memuat seluruh materi dan kegiatan yang dalam bidang pengajaran, mata pelajaran, masalah-masalah, proyek-proyek yang perlu dikerjakan.

Sedangkan isi kurikulum dapat disusun sebagai berikut:

1. Bidang-bidang keilmuan yang terdiri atas ilmu-ilmu sosial, administrasi, ekonomi, komunikasi, IPA, matematika, dan lain-lain.
2. Jenis-jenis mata pelajaran disusun dan dikembangkan bersumber dari bidang-bidang tersebut sesuai dengan tuntutan program.

¹¹Zainal Arifin, 2010, *Antologi Pendidikan Islam; Manajemen Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga). Hlm, 280.

3. Tiap mata pelajaran dikembangkan menjadi satuan-satuan bahasan atau standar kompetensi dan kompetensi dasar.
4. Tiap-tiap mata pelajaran dikembangkan dalam bentuk silabus dan RPP.¹²

Dari rumusan perencanaan dapat disimpulkan bahwa kurikulum itu tidak hanya memuat pada rangkaian susunan mata pelajaran, namun juga memuat seluruh aspek kegiatan pendidikan dan pendukung-pendukungnya. Hanya saja dalam perumusan lebih banyak difokuskan pada perencanaan pengajaran dengan menyusun materi ajar. Karena materi pelajaran adalah sesuatu yang dianggap urgen dalam kurikulum. Maka dalam perumusannya juga diperlukan adanya landasan yang kokoh sebagai pedoman.

E. Manajemen Pengorganisasian dan Pelaksanaan Kurikulum

Manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum adalah berkenaan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan optimal. Pengorganisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum, sehingga dalam hal ini, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengorganisasian kurikulum, di antaranya adalah:

1. Ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran dalam hal ini yang menjadi pertimbangan dalam penentuan materi pelajaran adalah adanya integrasi antara aspek masyarakat (yang mencakup nilai budaya dan sosial) dengan aspek peserta didik (yang mencakup minat, bakat, dan kebutuhan). Dan dalam hal ini, bukan hanya materi pelajaran yang

¹²Dadang Suhardan dkk, *Manajemen Pendidikan,...* Hlm,193.

harus diperhatikan, tetapi bagaimana urutan bahan tersebut dapat disajikan secara sistematis dalam kurikulum.

2. Kontinuitas kurikulum dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian kurikulum adalah yang berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari peserta didik, agar jangan sampai terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya.
3. Keseimbangan bahan pelajaran dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian bahan pelajaran dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berlangsung. Karena itu dalam pengorganisasian kurikulum keseimbangan substansi isi kurikulum harus dilihat secara komprehensif untuk kepentingan peserta didik sebagai individu, tuntutan masyarakat, maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dalam penentuan bahan pelajaran, aspek estetika, intelektual, moral, sosial-emosional, personal, religius, seni-aspirasi dan kinestetik, semuanya harus terakomodasi dalam isi kurikulum tersebut.
4. Alokasi waktu dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah alokasi waktu yang dibutuhkan dalam kurikulum harus sesuai dengan jumlah materi yang disediakan. Karena itu, penyusunan kalender pendidikan untuk mengetahui secara pasti jumlah jam tatap muka masing-masing pelajaran merupakan hal yang paling penting sebelum menetapkan bahan pelajaran.¹³

Dalam manajemen pendidikan, pelaksanaan kurikulum bertujuan supaya kurikulum dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini manajemen bertugas menyediakan fasilitas material, personal, maupun kondisi-kondisi supaya kurikulum dapat terlaksana secara kontinyu. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu:

¹³ Rusman, 2009, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: Rajawali Pers). Hlm, 3.

1. Pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah, yang dalam hal ini langsung ditangani oleh kepala sekolah. Selain bertanggung jawab supaya kurikulum dapat terlaksana di sekolah, kepala sekolah juga berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan yaitu menyusun kalender akademik yang akan berlangsung di sekolah selama satu tahun, menyusun jadwal pelajaran dalam satu minggu, pengaturan tugas dan kewajiban guru, dan lain-lain yang berkaitan tentang usaha untuk pencapaian tujuan kurikulum.
2. Pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, yang dalam hal ini dibagi dan ditugaskan langsung kepada para guru. Pembagian tugas ini di antaranya meliputi:
 - a. Kegiatan dalam bidang proses belajar mengajar.
 - b. Pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yang berada diluar ketentuan kurikulum sebagai penunjang tujuan sekolah.
 - c. Kegiatan bimbingan belajar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang berada dalam diri peserta didik dan membantu peserta didik dalam memecahkan masalah.¹⁴

F. Manajemen Pemantauan dan Penilaian Kurikulum

Pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi persoalan dalam kurikulum. Pelaksanaan kurikulum di dalam pendidikan harus dipantau untuk meningkatkan efektifitasnya. Pemantauan ini dilakukan supaya kurikulum tidak keluar dari jalur. Karena itu seorang yang ahli menyusun kurikulum harus memantau pelaksanaan kurikulum mulai dari perencanaan sampai dengan mengevaluasinya.¹⁵

Sesungguhnya untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan kurikulum yang dilakukan oleh guru, biasanya kepala sekolah melalui monitoring pelaksanaan kurikulum dapat menghimpun dan menganalisa

¹⁴ Dadang Suhardan dkk, *Manajemen Pendidikan,...* . Hlm, 195.

¹⁵ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan.....* Hlm, 19.

data yang diperlukan untuk perbaikan dan penyempurnaan kurikulum mendatang. Dalam tataran praktis, pemantauan kurikulum memuat beberapa aspek di antaranya adalah:

1. Peserta didik yaitu, dengan mengidentifikasi pada cara belajar, prestasi belajar, motivasi belajar, keaktifan, kreativitas, hambatan, dan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik.
2. Tenaga pengajar yaitu, dengan memantau pada pelaksanaan tanggung jawab, kemampuan kepribadian, kemampuan kemasyarakatan, kemampuan profesional, dan loyalitas terhadap atasannya.
3. Media pengajaran yaitu, dengan melihat pada jenis media yang digunakan, cara penggunaan media, pengadaan media, pemeliharaan dan perawatan media.
4. Prosedur penilaian yaitu, instrumen yang dihadapi peserta didik, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan hasil penilaian.
5. Jumlah lulusan kategori, jenjang, jenis kelamin, kelompok usia, dan kualitas kemampuan lulusan.¹⁶

G. Perbaikan Kurikulum

Kurikulum suatu pendidikan itu tidak hanya bersifat selalu statis, tetapi dapat berubah dan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan kurikulum itu sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang menuntutnya untuk melakukan penyesuaian supaya dapat memenuhi permintaan. Permintaan itu baik dikarenakan adanya kebutuhan dari peserta didik dan kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan pertumbuhan secara terus menerus.

Perbaikan kurikulum pada intinya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dapat disoroti dari dua aspek, yaitu proses dan produk. Kriteria proses menitikberatkan pada efisiensi pelaksanaan kurikulum dan sistem intruksional, serta bertujuan untuk mengetahui dan meramalkan rencana dan pelaksanaannya. Sedangkan kualitas produk

¹⁶Rahmat Raharjo, 2010, *Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka) . Hlm, 161.

melihat pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai dan *output* (kelulusan peserta didik). Berkaitan dengan prosedur perbaikan, seluruh komponen sumber daya manusia seperti administrator, pemilik sekolah, kepala sekolah, guru-guru, siswa, serta masyarakat juga mempunyai peran besar. Tanggung jawab masing-masing harus dirumuskan secara jelas. Selain itu aspek evaluasi juga harus dikaji sejak awal perencanaan program perbaikan kurikulum. Dengan evaluasi yang tepat dan data informasi yang akurat akan sangat diperlukan dalam membuat keputusan kurikulum dan intruksional.¹⁷

H. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum di sekolah/madrasah menuntut kreativitas pihak-pihak terkait dengan sekolah, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik, sekolah/madrasah, dan sosial budaya masyarakat di sekitar sekolah berada, dan dimungkinkan untuk memasukkan muatan lokal sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, peran aktif mereka dalam pengembangan kurikulum sangat berpengaruh terhadap efektivitas institusi sekolah dan menjadikan sekolah satu dengan sekolah lainnya berbeda sebagai ciri khas sesuai dengan visi dan misinya.¹⁸

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum di sekolah adalah sebagai berikut:

1. Guru dan Peserta Didik

Guru memegang peranan yang sangat penting, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Dia adalah perencanaan pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Guru merupakan barisan pengembang kurikulum terdepan, maka guru pulalah yang selalu melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kurikulum. Selain itu juga di dalam guru berperan sebagai komunikator, motivator belajar, pengembangan media belajar, pencoba, penyusun organisasi, manajer sistem pembelajaran,

¹⁷Rahmat Raharjo, 2010, *Inovasi Kurikulum* Hlm, 163.

¹⁸Rahmat Raharjo, 2010, *Inovasi Kurikulum*.....Hlm, 101.

pembimbing baik di sekolah maupun di masyarakat dalam hubungan pelaksanaan *long life education*. Berkat keahliannya tersebut maka seorang guru mampu mendorong kreatifitas anak.¹⁹

2. Kepala Sekolah

Keberhasilan pendidikan di sekolah dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah. Karena itu, kepala sekolah dituntut dapat berperan aktif dengan memberikan segala kemampuannya secara terus menerus dengan mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memimpin sekolah. Peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum begitu vital. Sehingga setiap kebijakan, kemampuan, visi, respon, dan kreativitasnya menghadapi perubahan kurikulum turut berperan besar bagi pengembangan kurikulum.

3. Komite Sekolah

Peran masyarakat untuk mendukung keberhasilan pendidikan di sekolah teramat tinggi. Karena itu, di tiap sekolah dibentuk lembaga perwakilan masyarakat dan orang tua wali peserta didik yang disebut badan pembantu pelaksanaan pendidikan (BP3) dan komite sekolah. Di samping sebagai penyandang dana dan jembatan antara hubungan masyarakat dengan sekolah, komite sekolah juga berperan sebagai lembaga kontrol terhadap kegiatan sekolah. Keterlibatan komite sekolah dalam pendidikan di sekolah merupakan realisasi tanggung jawab, kepercayaan dan harapan warga masyarakat dalam menyerahkan anaknya untuk dididik di sekolah. Selain itu, orang tua juga mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum, karena dalam hal ini diperlukan kerjasama yang sangat erat antara guru (pihak sekolah) dan para orang tua peserta didik agar setiap kegiatan-kegiatan tersebut memberikan umpan balik bagi penyempurnaan kurikulum secara simultan.

4. Pemerintah

¹⁹ Nik Haryati, *Pengembangan Kurikulum* Hlm, 106.

Pengembangan kurikulum yang dilakukan di sekolah idealnya dipandu oleh pihak pemerintah. Misalnya kementerian agama sebagai penanggung jawab bidang pendidikan agama, kementerian pendidikan dan kebudayaan sebagai penanggung jawab bidang pendidikan umum dan sebagainya. Di mana peran pemerintah dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar serta program inti kurikulum. Kerangka dasar dan program inti tersebut akan menentukan minimal *course* yang dituntut.²⁰

I. Problematika dalam Manajemen Kurikulum

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pengembangan kurikulum belum efektif jika pihak-pihak yang terkait belum siap mengemban tugas tersebut. Adapun penyebab ketidakefektifan pengembangan kurikulum yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas Guru

Peran terbesar dalam pengembangan kurikulum di sekolah secara praktis terletak pada kemampuan guru mata pelajaran bersangkutan. Ada banyak penyebab rendahnya kualitas guru dalam pengembangan kurikulum pembelajaran di antaranya yaitu:

- a. Adanya kekurangpahaman guru terhadap kurikulum itu sendiri adalah kelemahan ini memang diatasi oleh pihak pemerintah dan pihak sekolah dengan menyediakan program-program pelatihan atau workshop penyusunan kurikulum. Tetapi, pelatihan seperti ini belum menyentuh semua sekolah yang berada di daerah yang relatif terpencil. Meski sebagian sekolah telah mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan tampaknya itu pun belum cukup memadai. Program pelatihan yang singkat dan tidak diikuti dengan pendampingan oleh ahli masih menyulitkan sekolah untuk mengembangkan kurikulum sekolahnya dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum secara komprehensif.

²⁰Rahmat Raharjo, 2010, *Inovasi Kurikulum.....* Hlm, 110.

- b. Keterbatasan Sosialisasi. Sosialisai memang sudah dilakukan, namun hanya bagi guru di daerah atau sekolah maju. Bagi guru-guru yang sudah mengikuti sosialisasi tersebut diharapkan mampu untuk menularkan ilmunya kepada rekan guru yang belum mengikuti. Akan tetapi karena sosialisasi tersebut dilakukan tanpa *action plan* yang serius, maka tidak dapat dikembangkan dan diimplementasikan oleh para guru.
- c. Kurangnya Kesadaran guru itu sendiri adalah menyebabkan para guru kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan sistem pendidikan yang diberlakukan saat ini. Pada akhirnya membuat mereka ragu untuk melangkah dan takut salah.
- d. Rendahnya Motivasi guru adalah salah satu penyebabnya adalah kurangnya penghargaan pemerintah masyarakat, pimpinan yayasan dan pihak lainnya terhadap tingkat pengabdian guru.
- e. Keterbatasan Informasi. Adanya keterbatasan informasi juga menjadi kendala tersendiri. Banyak guru yang ketinggalan informasi, baik yang berkaitan langsung dengan bidang pendidikan seperti kurikulum maupun yang tidak secara langsung berkaitan dengan pendidikan.

2. Kepala Sekolah dan Pengurus Yayasan

Komponen pendidikan yang turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kekurangberhasilan proses pendidikan di sekolah adalah kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan. Selain kepala sekolah, untuk lembaga pendidikan swasta yang paling bertanggung jawab adalah pengurus yayasan. Peran kepala sekolah sangat besar dalam mengambil dan menentukan berbagai kebijakan sekolah, mengatur efektivitas organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi para guru dan karyawan. Demikian halnya dengan peran pengurus yayasan terhadap lembaga pendidikan yang dikelolanya. Namun, kebanyakan kepala sekolah dan pimpinan

yayasan belum mampu menjadi agen perubahan terkait dengan pemberlakuan kurikulum. Padahal peran kepala sekolah sangat strategis untuk melakukan perubahan pendidikan. Namun nyatanya, kepala sekolah tidak berperan cukup banyak sehingga banyak guru-guru yang kurang bebas dalam berkreasi.

3. Pengawas Pendidikan

Selain kepala sekolah dan guru yang berperan dalam pendidikan, ada pihak lain yang juga bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kenyataan menunjukkan bahwa peran pengawas tidak banyak memberikan kontribusi terhadap pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh guru, tetapi juga mempunyai tugas yang besar yaitu membina dan membimbing guru di sekolah yang tentunya juga terkait dengan pengembangan kurikulum. Namun pada kenyataannya para pengawas pendidikan ini masih kurang aktif dan kreatif dalam melakukan tugas pengawasan, penilaian dan pembimbingannya. Sehingga pengawasan yang dilakukannya ini hanya bersifat formalitas saja, yang menjadikan kinerja guru tidak optimal.

4. Komite Sekolah dan Masyarakat

Keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang tinggi. Berdasarkan kurikulum pembelajaran saat ini yaitu K-13, peran serta masyarakat dalam pengembangan kurikulum sangat diperlukan. Tampaknya pemerintah juga kurang memperhatikan peran komite sekolah sebagai wakil masyarakat dalam mengembangkan kurikulum. Seharusnya sebelum suatu kurikulum diberlakukan, pemerintah terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terencana dan terus menerus sehingga mereka mengetahui dengan benar tugas dan fungsinya sebagai komite sekolah. Namun kenyataannya adanya koordinasi komite sekolah dengan sekolah terjadi hanya pada program yang menyangkut pendanaan. Adapun permasalahan yang terkait dengan pendidikan di sekolah/madrasah,

komite sekolah tidak terlalu peduli. Sehingga, dengan sikap komite yang demikian menjadikan guru kesulitan untuk membangun motivasi belajar peserta didik.²¹

J. Peran Pemimpin dalam Manajemen Kurikulum di Madrasah Aliyah Nurul Jadid

Setelah membahas manajemen kurikulum dari segi teori, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran pemimpin dalam mengelola kurikulum di Madrasah Aliyah Nurul Jadid terkait perencanaan dan pengorganisasian kurikulum madrasah, pihak-pihak penentu kurikulum, problematika pengembangan kurikulum, dan langkah kebijakan kepala madrasah dalam mengatasi problematika manajemen kurikulum. Menurut Bapak Lukman Al-Hakim selaku Kepala Madrasah Aliyah Nurul Jadid, kurikulum yang ada di Madrasah Aliyah ini ada tiga komponen yaitu kurikulum Kemenag, Kemendikbud, dan Pesantren. Semuanya harus diterapkan di madrasah, hal ini dikarenakan pesantren merupakan lembaga yang menaungi madrasah, visi, misi, dan tujuan dari madrasah juga berbasis pesantren. Oleh karena itu sebagai seorang pemimpin/kepala madrasah, kecuali sebagai fasilitator dan penentu juga harus mampu mengelola dan mengembangkan ketiga kurikulum potensial ini menjadi satu kesatuan.²² Adapun untuk tahap-tahap perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan sosialisasi kurikulum ini diserahkan sepenuhnya kepada bidang yang dianggap kepala madrasah lebih kompeten yaitu bidang kurikulum.²³ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ada beberapa hal penting yang ditemui didalam manajemen kurikulum di Madrasah Aliyah Nurul Jadid di antaranya meliputi:

1. Kurikulum Madrasah

²¹ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan.....* Hlm, 91.

²² Wawancara dengan Bapak Lukman Al-Hakim, Kepala Madrasah Aliyah Nurul Jadid, 15 Januari 2018.

²³ Wawancara dengan Bapak Mohammad Na'im, Waka Kurikulum Madrasah Aliyah Nurul Jadid, 15 Januari 2018.

Kurikulum yang ada di madrasah ini sama halnya dengan sekolah pada umumnya yaitu menggunakan kurikulum satuan pendidikan. Namun dikarenakan madrasah ini di bawah naungan yayasan pesantren (PP. Nurul Jadid) yang di dalamnya terdapat Biro Pendidikan yang menaungi semua lembaga pendidikan di lingkungan PP. Nurul Jadid, maka juga menggunakan kurikulum pesantren secara proporsional. Artinya, muatan kurikulumnya diberi perimbangan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan Yayasan Pendidikan Islam PP. Nurul Jadid. Penentuan kurikulum pembelajaran pihak madrasah menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan Kemenag dan Kemendikbud selaku pemegang kewenangan baik secara akademik maupun administratif. Adapun untuk perencanaan kurikulumnya menurut pihak madrasah semuanya diserahkan kepada waka bidang kurikulum, meski kurikulum Kemenag dan Kemendikbud sudah ditentukan langsung dari atas (pemerintah), begitu juga dengan kurikulum pesantren. Peran pihak madrasah melengkapi hal-hal yang masih dianggap kurang memadai. Kesemuanya dikomunikasikan dengan pihak Biro Pendidikan. Kepala Madrasah sebagai pemegang mandat untuk mengelola pelaksanaan kurikulum dengan segala konsekuensinya seyogyanya tidak perlu adanya campur tangan pihak yayasan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan yang pada gilirannya terjadi mismanajemen, sebab secara berkala pihak yayasan dapat memonitor sebagai evaluasi kinerja. Sedangkan untuk sosialisasi pengembangan kurikulum itu sendiri juga diserahkan sepenuhnya kepada waka di bidang kurikulum dan para guru pengampu mata pelajaran. Meskipun suatu kurikulum sudah terencana dan terlaksana dengan baik, dikarenakan adanya perubahan dan atau tuntutan masyarakat/stakeholder, maka kurikulum yang ada di madrasah juga harus mengalami perubahan. Tentu saja perubahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum baik

yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, terutama kurikulum pendidikan Islam.

2. Pihak-pihak yang berperperan dalam pembentukan Kurikulum Madrasah

Adapun pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan kurikulum di Madrasah Aliyah Nurul Jadid ini selain Kemenag dan Kemendikbud yaitu semua waka yang ada di Madrasah Aliyah baik waka bidang kesiswaan, waka bidang pengajaran, waka bidang sarana dan prasana dan sebagainya. Namun pihak yang paling penting adalah waka di bidang pengajaran, karena semua konsep perencanaan kurikulum pembelajaran ditentukan dan dibuat oleh bidang pengajaran. Kemudian pihak yang berperan dalam penentuan kurikulum madrasah adalah Biro Pendidikan PP. Nurul Jadid. Biro Pendidikan ini merupakan penentu yang paling penting, karena setiap apa yang dirancang oleh pihak madrasah harus disetujui oleh Biro Pendidikan. Jika Biro Pendidikan tidak berkenan maka semua konsep yang sudah ditentukan madrasah tidak berlaku.

3. Problematika dalam pengembangan kurikulum madrasah

Semacam hukum alam, bahwa setiap upaya pengembangan lembaga pendidikan tentu akan mengalami problematika baik dalam pengelolaan, pembelajaran maupun pelaksanaan tugasnya. Adapun problematika yang terjadi di Madrasah Aliyah Nurul Jadid terhadap pengembangan kurikulum yaitu adanya hambatan baik dari fasilitas personal (guru), maupun dari fasilitas prasarana/sarana. Problem guru adalah kurangnya tenaga pendidik yang sesuai dengan bidang keahliannya dan kuantitas (tidak seimbang rasio guru dengan siswa), problem prasarana/sarana kurang memadai.

4. Langkah kebijakan kepala madrasah dalam mengatasi problematika manajemen pengembaganm kurikulum

Ada beberapa langkah yang ditempuh oleh Kepala Madrasah Aliyah Nurul Jadid mengatasi problematika manajemen pengembangan kurikulum antara lain:

- a. Bahwa guru sejatinya adalah *curriculum designer* (perancang kurikulum), maka merupakan keniscayaan bagi guru harus mempunyai komitmen terhadap pengembangan kurikulum. Untuk itu, pendidikan dan latihan tentang kurikulum menjadi prioritas (*In Service Training/Education*). Dilaksanakan atas dasar mengikuti perkembangan kekinian secara berkala dan terpola.
- b. Bahwa manajemen pengembangan kurikulum pendidikan Islam menurut beliau seyogyanya diimplementasikan berdasarkan dengan penekanan pada roh pendidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara; *Love* (kasih sayang), *Honesty* (kejujuran), *Spiritualy* (keagamaan), *Sincerely* (Pengabdian/Keikhlasan), dan *Familirity Atmosphere* (suasana kekeluargaan).
- c. Memberikan motivasi kepada pendidik untuk terus meningkatkan profesionalitasnya dalam mendidik, mengajar, dan memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik.

K. Analisis

Mencermati dari uraian di atas mengenai kurikulum yang ada di Madrasah Aliyah Nurul Jadid dapat diketahui terdapat perbedaan dengan madrasah lainnya. Karena kurikulum pembelajaran yang dikembangkan tidak terbatas oleh ketentuan dari pemerintah saja (Kemenag dan Kemendikbud) tetapi juga menggunakan kurikulum pesantren. Ketiga komponen kurikulum yang dirangkum menjadi satu kesatuan mempunyai tujuan agar pembelajaran terlaksana dengan baik dan seimbang. Untuk itu, pihak yang berperan dalam pembentukan kurikulum madrasah yaitu pemerintah, pihak madrasah, biro pendidikan, dan yayasan termasuk

komite madrasah yang walaupun keberadaannya hanya sebatas pelengkap/formalitas.

Adapun problematika yang dihadapi merupakan bagian dari pemicu dalam konteks memanej pengembangan kurikulumnya secara optimal dengan mengidentifikasi permasalahan secara terukur pada peningkatan mutu guru sebagai perancang kurikulum agar tidak alergi terhadap perubahan, termasuk perubahan kurikulum. Indikatornya adalah adanya komitmen dari pihak kepala sekolah dan yayasan serta komite madrasah untuk meningkatkan kualitas guru dengan diklat berkala dan terpola serta meningkatkan fasilitas prasarana/sarana pendidikan.

L. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pengembangan kurikulum perspektif pendidikan Islam merupakan sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis (holistic) yang mengacu ketercapaian tujuan pendidikan (kurikulum) yang sudah dirumuskan. Proses manajemen pengembangan kurikulum tidak lepas dari *Team Work* (kerjasama) dengan bantuan sumber daya yang mendukungnya. Pelaksanaanya dengan strategi tertentu yang efektif dan efisien, serta mengacu pada visi, misi, dan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun pihak yang berperan dalam pembentukan kurikulum yaitu pemerintah, pihak madrasah, biro pendidikan, yayasan dan komite madrasah. Sedangkan untuk problematika dalam manajemen pengembangan kurikulum terdapat pada mutu guru itu sendiri, Kepala Sekolah dan Pengurus Yayasan, Pengawas (dewan) Pendidikan, Komite Madrasah. Berbagai macam problematika tersebut, maka peran seorang pemimpin dalam mengatasi probelematika yang ada yaitu dengan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh segenap aparat yang ada untuk selanjutnya mengadakan pembenahan dan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal, 2010, *Antologi Pendidikan Islam; Manajemen Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga.
- Baharun, H. (2016). PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA; TELAAH EPISTEMOLOGIS. *Pedagogik*, 3(2), 96–107.
- Baharun, H. (2017). *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktik (Konsep, Prinsip, Pendekatan dan Langkah-langkah Pengembangan Kurikulum PAI*. Yogyakarta: CV Cantrik Pustaka.
- Hasan Baharun, Z. (2017). *Manajemen Mutu Pendidikan : Ikhtiar dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah melalui Pendekatan Balanced Scorecard*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Islam, S. (2017). Karakteristik Pendidikan Karakter; Menjawab Tantangan Multidimensional Melalui Implementasi Kurikulum 2013, 1(1), 89–101.
- Hamalik, Oemar, 2006, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Haryati, Nik, 2011, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam*, Bandung: Alfabeta.
- Muhaimin, dkk., 2009, *Manajemen Pendidikan; Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, Anim, 2010, *Inovasi Kurikulum; Telaah Terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren*, Yogyakarta: Teras.
- Raharjo, Rahmat, 2010, *Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Magnum Pustaka.
- Rusman, 2009, *Manajemen Kurikulum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhardan, Dadang, dkk., 2009, *Manajemen Pendidikan, Bandung*; Alfabeta.
- Sulistiyorini, 2009, *Manajemen Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras.
- Usman, Husaini, 2008, *Manajemen; Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- UU No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional.